

BAB 3

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KOLONIAL YANG DIJALANKAN DAN PERJUANGAN TAMANSISWA MENGHADAPI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KOLONIAL

3.1 Berlakunya Kebijakan Ordonansi Sekolah Liar Belanda

Tamansiswa sebagai lembaga pendidikan yang didirikan ditengah alam kolonial merupakan sebuah tantangan terhadap politik pengajaran kolonial. Berdirinya sekolah-sekolah pribumi seperti Tamansiswa dan banyaknya sekolah swasta yang didirikan oleh kaum pribumi menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah kolonial.¹¹⁰ Pemerintah sudah berusaha mengawasi sekolah-sekolah yang tidak disubsidi sejak awal tahun 1920. Laporan-laporan mengenai pendidikan swasta tidak bersubsidi mulai dimunculkan dalam dokumen-dokumen pemerintah kolonial sejak tahun 1922. Pertama kali laporan yang muncul adalah laporan kepada Gubernur Jenderal Fock dari J.F.W Van Der Meulen, direktur pendidikan dan peridabatan umum (*Directeur van Onderwijs en Eredienst*), mengenai sekolah-sekolah Cina yang didirikan, yaitu sekolah Sarekat Islam yang dibuka oleh Tan Malaka di Semarang pada 21 Juni 1921. Sementara berita lainnya menginformasikan bahwa latihan guru telah dibuka oleh Soewardi di Yogyakarta.¹¹¹ Latihan guru yang dimaksud jelas ditunjukkan kepada Tamansiswa, kemudian laporan-laporan tersebut menjadi sebuah catatan dan perhatian penting bagi pemerintah kolonial Belanda untuk bertindak.

¹¹⁰ Ridha Laeli, "Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor Organisasi Wanita Tamansiswa". S1 Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019, hlm 2-4.

¹¹¹ Kenji, *op.cit*, hlm 248.

Meulen berpendapat bahwa sekolah-sekolah Cina itu memberikan pelajaran yang anti Belanda berdasarkan nasionalisme Cina di Kalimantan Barat, dan sekolah-sekolah di Semarang dan Yogyakarta menyebarkan prinsip-prinsip tidak konstruktif diantara anak-anak. Sementara Meulen juga menganjurkan agar guru-guru yang bersangkutan diwajibkan mendaftar pada penguasa-penguasa pemerintahan, jadwal pelajaran harus diawasi, dan residen-residen harus diberi kekuasaan untuk melarang mereka mengajar di kerasidenannya agar dapat mengatasi pendidikan antisosial tersebut.¹¹² Kondisi tersebut menunjukkan rasa keprihatinan bagi pemerintah kolonial dengan didirikannya pendidikan swasta tidak bersubsidi pada awal 1920, mereka menyayangkan adanya pendidikan anti Belanda dari kaum pribumi.

Melihat perkembangan tersebut pemerintah kolonial atas nama Gubernur Jenderal B.C. de Jonge secara resmi mengeluarkan kebijakan pendidikan yang diberi nama *Toezicht Ordonantie Particulair Onderwijs*, yang dikenal dengan nama *De Wilde Scholen Ordonantie* atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Ordonansi Sekolah Liar yang didirikan pada tahun 1932.¹¹³ Secara garis besar isi dari Undang-Undang Sekolah Liar tersebut dilihat dari 4 bagian, yang isinya sebagai berikut:

1. Guru-guru yang akan mengajar harus meminta izin terlebih dahulu kepada *Hoofd van Gewestelijk Bestuur* (Kepala Pemerintahan Daerah)

¹¹² *Ibid*, hlm 248-249.

¹¹³ *Ibid*, hlm 248.

2. Sekolah baru yang didirikan harus meminta izin juga kepada *Hoofd van Gewestelijk Bestuur* (Kepala Pemerintahan Daerah)
3. Hukuman bagi setiap orang yang melanggar ordonansi ini dihukum selama-lamanya 8 hari penjara atau denda sebanyak-banyaknya f.25. Hukuman ini akan diperberat menjadi selama-lamanya 1 bulan dan denda sebanyak-banyaknya f.200 apabila dalam waktu itu pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang maupun per kelompok belum lewat dari dua tahun.
4. Guru-guru yang pada tanggal 1 Oktober 1932 sedang memberikan pengajaran dalam ordonansi ini, diwajibkan untuk meminta izin dalam tempo 6 bulan (paling lambat tanggal 31 Maret 1933), demikian juga dengan Kepala Sekolah yang harus melapor kepada *Hoofd van Gewestelijk Bestuur* (Kepala Pemerintahan Daerah).¹¹⁴

Undang-undang mengenai Ordonansi Sekolah Liar tersebut menjadi sebuah perhatian khusus bagi sekolah-sekolah swasta tak bersubsidi. Kaum pribumi menilai bahwa undang-undang tersebut sebenarnya hanya ditunjukan untuk kepentingan politik kolonial, terbukti dengan banyaknya guru dan kepala sekolah yang masih sulit mendapatkan izin dalam mengajar atau mendirikan sekolah. Pemerintah kolonial dinilai hanya memainkan undang-undang tersebut untuk menyulitkan aktivitas pendidikan yang dilakukan kaum pribumi.

Kebijakan ordonansi sekolah liar tersebut juga menjadi ancaman besar bagi Tamansiswa dalam menjalankan kegiatan pendidikannya. Perkembangan yang

¹¹⁴ Dwi Purwoko, "Semangat Tamansiswa dan Perlawanannya Terhadap Undang-Undang Sekolah Liar", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 1, No 2, 1994, hlm 129-130.

dialami Tamansiswa begitu pesat menyebabkan pemerintah kolonial tidak tinggal diam, terlebih Tamansiswa merupakan sekolah yang tidak dikelola oleh pemerintah Belanda, sehingga setiap aktivitasnya pun harus meminta izin terlebih dahulu.¹¹⁵ Pemerintah kolonial selalu melakukan upaya untuk mempersulit dan membatasi kemajuan Tamansiswa. Upaya pertama yang dilakukan adalah menutup dan menyegel Tamansiswa karena pendiriannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintahan Belanda. Kondisi tersebut tidak mematahkan semangat Tamansiswa dalam mengadakan kegiatan pendidikan, Tamansiswa tetap mengadakan kegiatan belajar yang dilakukan di rumah masing-masing guru. Tamansiswa mampu menunjukkan sikap keberanian yang luar biasa, meskipun sangat beresiko karena para guru mulai ditangkap oleh pemerintahan Belanda secara bergantian.

Upaya kedua ditunjukkan kepada pimpinan Tamansiswa yaitu Ki Hadjar Dewantara yang mendapatkan kekangan oleh pemerintah Belanda.¹¹⁶ Pemerintah kolonial menyita seluruh peralatan mengajar di rumah Ki Hadjar Dewantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pengajaran bagi kaum pribumi.¹¹⁷ Upaya yang dilakukan pemerintah kolonial tersebut dilakukan karena mereka mulai curiga terhadap sistem pengajaran Tamansiswa yang diberikan, mereka khawatir pengajaran yang diberikan tersebut justru dijadikan sebagai propaganda politiknya dalam melawan kekuasaan.

¹¹⁵ Amalia Haidah, "Kiprah Organisasi Wanita Tamansiswa Dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan Indonesia", *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol 2, No 3, 2023, hlm 34.

¹¹⁶ Dwi Purwoko, *op.cit*, hlm 130.

¹¹⁷ Kenji, *op.cit* hlm 131.

3.2 Perjuangan Tamansiswa Menghadapi Kebijakan Ordonansi Sekolah Liar Belanda

Pemimpin-pemimpin Tamansiswa mulai mencatat langkah-langkah pemerintah untuk mengawasi sekolah liar yang berdiri. Perjuangan Tamansiswa dalam melakukan perlawanan selalu mementingkan prinsip tertib dan damai di atas segala-galanya, sementara berbanding terbalik dengan pemerintahan kolonial yang melihat prinsip tertib dan damai tersebut sebagai alasan untuk memberlakukan ordonansi.¹¹⁸ Sikap Tamansiswa dalam menghadapi ordonansi tersebut mampu menunjukkan sikap cepat dan cermat dalam setiap perlawanannya. Langkah awal yang dilakukan Ki Hadjar Dewantara sebagai pimpinan Tamansiswa yaitu dengan memanggil Majelis Luhur Harian yang meneliti Ordonansi Sekolah Liar pada 29 September dengan menyatakan sikap dasar terhadap undang-undang sekolah liar tersebut, yang kemudian mengeluarkan kata seruan yang isinya sebagai berikut:

1. Ordonansi baru tersebut memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk memeriksa bentuk maupun isi sekolah-sekolah swasta yang tidak dikelola oleh pemerintahan Belanda dan menyerahkan ketentuan kriteria pengawasan kepada pejabat-pejabat setempat.
2. Tamansiswa yang pada umumnya berlawanan dalam bentuk dan isi dengan sekolah gaya Barat, penggunaan ordonansi tersebut seringkali menimbulkan salah paham antara pemerintah dan pejabat di satu pihak serta organisasi Tamansiswa di lain pihak yang menyebabkan adanya tindakan-tindakan yang

¹¹⁸ *Ibid.*

salah. Ordonansi baru tersebut merupakan penghambatan bagi pekerjaan suci Tamansiswa.

3. Penilaian kecakapan guru akan cenderung menggunakan pertimbangan subjektif dari pihak pejabat-pejabat bersangkutan, khususnya mengenai sikap guru apakah mereka hanya berkepentingan politik saja atau mampu bersikap nasionalis, karena tidak perlu dikhawatirkan bahwa fasilitas-fasilitas dan teknik-teknik pendidikan Tamansiswa tidak akan melampaui mutu yang diwajibkan oleh ordonansi baru. Kondisi tersebut di yakini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang salah.
4. Kebijakan ordonansi tersebut sama halnya berlaku untuk sekolah-sekolah liar lain yang mempunyai prinsip sendiri seperti Tamansiswa, hal tersebut dirasa tidak baik untuk ketertiban umum.
5. Sikap pemerintahan Belanda yang cukup mendadak dalam mempersiapkan ordonansi tersebut, membuat Ki Hadjar Dewantara memberikan peringatan agar seluruh sikap dan aksi yang dilakukan Tamansiswa diserahkan semua kepada Ki Hadjar Dewantara, dengan tujuan agar dapat menjauhkan rakyat dan Tamansiswa dari bahaya-bahaya ordonansi tersebut.
6. Ki Hadjar Dewantara menganjurkan agar semua masalah yang berhubungan dengan ordonansi dan menyangkut anggota-anggota Tamansiswa, lebih dahulu harus dibicarakan dalam dewan kelompok regional (Majelis Golongan).¹¹⁹

Majelis Luhur Harian secara tegas menolak keras ordonansi 1932 dan mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan tertib dan damai Tamansiswa,

¹¹⁹ Ibid, hlm 258-260.

yang memberikan kekuasaan penuh kepada Ki Hadjar Dewantara. Pendirian tersebut didasari karena kesadaran bahwa *orde en rust* yang hendak di paksakan pemerintah mengancam tertib dan damai yang sedang diusahakan Tamansiswa.¹²⁰ Sepanjang perjalanan selanjutnya Tamansiswa mempertahankan dua pendirian, yang pertama mendesak pemerintah untuk mencabut ordonansi, dan yang kedua mempertahankan pendirian mereka mengenai prinsip tertib dan damai.

Perjuangan menentang ordonansi tersebut dilakukan Ki Hadjar Dewantara beserta pengikutnya. Seluruh sekolah Tamansiswa yang terkena dampaknya dari ordonansi tersebut bertekad untuk mengadakan perlawanan pasif. Ki Hadjar Dewantara membuktikan tekad tersebut dalam kawatnya kepada Gubernur Jendral dan juga dalam pembicaraan lisannya dengan Kieweiet de Jonge yaitu pejabat yang bertindak selaku kuasa pemerintah yang berkunjung ke rumahnya. Perlawanan Tamansiswa tersebut nampaknya mulai mendapat simpati dan dukungan dari kaum pergerakan nasional terutama yang mengelola pendidikan swasta, kondisi tersebut ditunjukkan ketika Ki Hadjar Dewantara mulai menyebarkan perlawanan melalui media massa sehingga menjadi ramai.

Beberapa perlawanan pun muncul dari organisasi seperti PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Permi, dan Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Tamansiswa, Budi Utomo (BU), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Partindo), serta Istri Sedar untuk menentang ordonansi tersebut. Perlawanan tersebut diawali dengan diadakannya rapat konperansi yang dilakukan oleh organisasi sosial politik, baik yang kooperasi maupun nonkooperasi pada

¹²⁰ *Ibid*, hlm 260.

Oktober 1932 sampai Februari 1933. Organisasi yang berhaluan kooperasi yang cenderung loyal terhadap pemerintahan justru menentang ordonansi tersebut. Budi Utomo menegaskan melalui konferensinya pada bulan Desember 1932 yang menyebutkan bahwa jika hingga akhir bulan Maret 1933 ordonansi tersebut tak kunjung dibubarkan, maka seluruh wakilnya di *Volksraad* dan dewan setempat akan ditarik kembali.¹²¹ Tamansiswa juga bertekad menentang ordonansi tersebut mulai melancarkan perlawanannya yang mereka lakukan baik secara dilakukan dengan diam-diam atau melakukan perlawanan pasif, serta menyuarakan ordonansi tersebut melalui media massa (pers), dengan Majalah Poesara nya. Perjuangan yang dilakukan oleh Tamansiswa sejalan dengan teori tindakan kolektif karena perjuangan yang dilakukan oleh kaum pribumi mampu menunjukkan sikap terlembaga dalam melakukan perlawanan. Teori tindakan kolektif juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menginginkan suatu perubahan, sekelompok orang yang dimaksud disatukan dalam sebuah kelompok, asosiasi, organisasi, jaringan yang terlembaga.¹²² Sejalan dengan teori tersebut kaum pribumi yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan ordonansi sekolah liar dilakukan dalam satu lingkup organisasi yang sama yaitu Tamansiswa, dengan tujuan untuk mengubah kebijakan pendidikan ordonansi sekolah liar yang dinilai merugikan Tamansiswa sebagai organisasi pendidikan.

¹²¹ Dwi Purwoko, *op.cit*, hlm 131-133.

¹²² Oman Sukmana, *loc.cit*

3.2.1 Perlawanan Diam-Diam Menghadapi Kebijakan Ordonansi Sekolah Liar

Perlawanan Tamansiswa secara diam-diam yang pertama kali dilakukan adalah dalam bentuk telegram yang dikirimkan oleh Ki Hadjar Dewantara langsung kepada Gubernur Jenderal pada 1 Oktober 1932. Telegram tersebut dikirimkan sendiri atas nama Ki Hadjar Dewantara tepat pada hari ordonansi tersebut mulai berlaku, yang dikirim kepada Gubernur Jenderal De Jonge di tempat kediamannya di Bogor.¹²³ Isi mengenai telegram tersebut diantaranya sebagai berikut:

“Yang Mulia. Kenyataan bahwa sebuah ordonansi yang akan merusak jiwa masyarakat dan kebudayaan (kami) akan diberlakukan dengan paksa dan tanpa peringatan sesudah rencana-rencana pemerintah gagal memperluas pendidikan adalah bukti dari kegelisahan dan kebingungan suatu pemerintahan yang gagal memahami kepentingan-kepentingan yang memengaruhi hidup dan matinya rakyat. Oleh karena itu, saya memperingatkan bahwa sekali pun yang tidak berdaya akan mempertahankan diri secara instingtif demi kelangsungan hidupnya (*zelfs onweerbaren instinctief uit zelfbehoud zich verweren*), kami sebisa-bisanya akan memberikan perlawanan pasif, dengan cara yang sama, sepanjang yang diperlukan.”¹²⁴

Telegram tersebut ditulis dalam bahasa Belanda yang secara jelas menolak keras ordonansi sekolah liar, setelah mengirimkan protes tersebut, Ki Hadjar Dewantara kembali melancarkan perlawanannya dengan mengeluarkan maklumat kepada semua anggota Tamansiswa dengan judul *Membatalkan Ordonansi Dengan Seketika*, dan pada 3 Oktober ia mengeluarkan Maklumat kepada seluruh pemimpin pergerakan rakyat tentang sebuah Ordonansi pendidikan.¹²⁵

¹²³ Kenji, op.cit, hlm 261.

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid*, hlm 262.

Maklumat Ki Hadjar Dewantara yang pertama menjelaskan dengan rinci arti dan keuntungan dari perlawanan diam-diam yang dikirim dalam telegram, dan menjelaskan mengenai alasan yang menyebabkan penerimaan perlawanan diam-diam. Awalnya ia melukiskan perlawanan diam-diam tersebut dengan kata yang panjang dan lebar seperti berikut:

“Untuk melawan tekanan penguasa-penguasa, rakyat harus menggunakan kekuatan tenaga rakyat secara efektif. Betapa pun kerasnya mereka meneriakkan protes dan tuntutan-tuntutannya, tanpa menggunakan kekuatan tenaganya, bagi penguasa semua itu paling-paling akan dianggap sebagai regekan anak-anak yang manja. Ada dua cara untuk menggunakan kekuatan: secara aktif dan secara pasif. Cara aktif digunakan bila dua tenaga yang berhadapan sama kuat. Cara pasif ialah cara yang digunakan jika kekuatan lahir yang satu tidak mengimbangi kekuatan lahir lawannya. Perlawanan pasif bukan berarti berdiam diri secara lahir dan batin; artinya ialah berdiam diri dan tidak berubah (mbegogok) secara lahir, tapi dalam waktu ini tetap meempertahankan kebebasan, tidak mengakui sourvereinitcit, kedaulatan, lawan. Perlawanan pasif adalah perlawanan seperti ini.”¹²⁶

Ki Hadjar Dewantara selanjutnya selalu menekankan pada perlawanan pasif kepada seluruh anggota Tamansiswa. Cara yang dilakukan sangat sukar karena orang harus menggunakan kekuatan batin dalam menghadapi perlawanan, tenaga diam saja bisa melawan ordonansi baru itu untuk mundur. Ia kemudian menjelaskan alasannya mengenai ordonansi tersebut beserta tindakan-tindakannya yang telah ia lakukan. Ia merasakan bahwa ordonansi tersebut dapat menghilangkan hak asasi orang tua dan rakyat untuk memilih cara mendidik anaknya, dan berusaha mengawasi sekolah-sekolah yang berdiri tanpa subsidi pemerintah.¹²⁷ Pemerintah dinilai telah menerobos menggunakan gerakan politik yang menjadi penghalang bagi dunia pendidikan.

¹²⁶ *Ibid*, hlm 262-263.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 263.

Ki Hadjar Dewantara kembali melakukan perlawanannya dalam kapasitasnya secara pribadi, ia nampaknya masih belum puas dengan perlawanannya tersebut yang dilakukan atas nama Tamansiswa, sehingga ia akan melakukan perlawanan juga dengan kapasitasnya sebagai perseorangan. Perlawanannya tersebut dinilai akan menghadapi resiko yang cukup besar yang mana banyak orang yang akan meninggalkannya, namun menurutnya perlawanan dirasa kurang apabila dilakukan hanya melalui instansi saja. Ia menilai apabila ordonansi sekolah liar ini tetap dipertahankan, berarti akan mematikan kebebasan rakyat untuk mengadakan pendidikan menurut cara dan tujuan mereka sendiri, yang akan tinggal hanyalah sistem pendidikan yang disubsidi oleh pemerintahan dengan gaya kebarat-baratan.¹²⁸

Melihat perkembangan dari pemerintahan kolonial yang tak kunjung merespon telegram yang dikirimkan atas nama Tamansiswa, akhirnya ia bertindak sebagai pribadi dan menyerukan bahwa persatuan Tamansiswa sama sekali bebas untuk bertindak menurut pandangan mereka sendiri, selengkapny mengenai perkataan Ki Hadjar Dewantara sebagai berikut:

“Saya akan sepenoehnya toendoek pada kepoetoesan-kepoetoesan Tamansiswa sebagai keseloeroehan. Jika kepoetoesan keseloeroehan itu berbeda dengan pendirian ssaya, saya berdjanji akan meminta kepada rakyat yang menganggap saya benar supaya mereka itu menentang keputusan saya. Patuhilah kepoetoesan mayoritas. Djika itu tidak menyenangkan bagi Anda, saya anjurkan tinggalkanlah “organisasi” Tamansiswa soepaya tidak menghancoerkan tertib dan damai.”¹²⁹

Seruan kepada anggota-anggota Tamansiswa adalah kompleks, sambil mengeluarkan maklumat sebagaimana seorang pemimpin, Ki Hadjar Dewantara

¹²⁸ *Ibid*, hlm 264.

¹²⁹ *Ibid*.

mulai melakukan protes terhadap Gubernur Jenderal dalam kapasitasnya sebagai perseorangan.¹³⁰ Maklumat Ki Hadjar Dewantara yang telah dikeluarkan kepada anggota-anggota Tamansiswa tersebut mengandung beberapa unsur diantaranya yaitu penjelasan tentang perlawanan pasif atau perlawanan diam-diam, penolakan terhadap ordonansi, dan tuntutan supaya bersatu dalam kalangan sendiri yaitu Tamansiswa.

3.2.2 Perlawanan Melalui Majalah Poesara Dalam Menghadapi Kebijakan

Ordonansi Sekolah Liar

Perlawanan yang dilakukan secara diam-diam dirasa masih kurang sehingga pimpinan-pimpinan Tamansiswa menilai bahwa perlawanan juga harus dilakukan melalui media pers (majalah) dalam menghadapi perlawanan terhadap ordonansi sekolah liar. Pemimpin-pemimpin Tamansiswa mulai mencatat langkah-langkah pemerintah untuk mengawasi sekolah liar tersebut. Perlawanan berupa kritikan keras mengenai ordonansi sekolah liar tersebut mulai disampaikan melalui tulisan yang berkali-kali diterbitkan. Pertama kali perlawanan yang dilakukan melalui Majalah Poesara terlihat dalam *Rubrik Kritik dan Komentari* dalam edisi pertama Poesara, yang diterbitkan pada Oktober 1931 dan ditulis oleh Ki Hadjar Dewantara, diantaranya ia membicarakan mengenai dua persoalan dalam tulisan tersebut.

Persoalan yang pertama adalah kondisi dari kaum pribumi yang belakangan ini membuka sekolah untuk mencari makan atau semata-mata karena *dilettantism* (amatir). Pandangan Ki Hadjar Dewantara mengenai persoalan tersebut sependapat juga karena menurutnya tempat-tempat demikianlah yang seharusnya

¹³⁰ *Ibid*, hlm 265.

disebut rumah perniagaan, toko, atau *ambachtswerkplaats* untuk menjual ilmu. Tempat-tempat tersebut dinilai tidak layak untuk disebut sebagai sekolah dan guru-gurunya juga tidak berharga disebut sebagai Sang Guru.¹³¹ Kondisi tersebut yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi Ki Hadjar Dewantara beserta kawan-kawan di Tamansiswa.

Persoalan kedua adalah mengenai perintah yang dikeluarkan oleh *Binnenlandsch Bestuur* (Departemen Dalam Negeri) tentang kepala desa yang harus memberitahukan rakyat mengenai bahayanya sekolah liar. Ki Hadjar Dewantara menentang keras mengenai hal itu karena pada prinsipnya Tamansiswa tidak pernah menyebut sekolah-sekolah *Hollandsch Indlandsche School* (Sekolah dasar bumi putera) atau dengan nama-nama lain yang disebut dalam sistem pendidikan Belanda. Tamansiswa difitnah berkali-kali mengenai hal tersebut, ia tetap dipaksa untuk diam. Akar kesalahan yang terjadi sebenarnya ditunjukan bagi jawatan sipil dalam mengatasi masalah ini, karena kurangnya dana pemerintah untuk menyediakan sekolah-sekolah untuk keperluan rakyat. Meskipun Mataram telah mengumumkan mengenai pembetulan dan pengecualian Tamansiswa dari sekolah lia dua minggu setelah menyajikan pendirian pemerintah dalam karangannya, namun pada kenyataanya Tamansiswa tetap tidak bisa disebut bukan sekolah liar, karena pemerintah kolonial sangat memperhatikan sekali mengenai sekolah-sekolah tak bersubsidi tersebut.

Ki Hadjar Dewantara kembali menuliskan laporan-laporan nya yang ditunjukan kepada orang-orang yang meremehkan Tamansiswa dengan dibantu

¹³¹ *Majalah Poesara*, Oktober 1931, *loc.cit.*

oleh residen-residen dan pejabat-pejabat lain seperti di Magelang dan Kalimantan. Ia juga turut memberikan seruan untuk seluruh elemen Tamansiswa seluruh cabang, untuk melaporkan semua campur tangan pemerintah kepada Majelis Luhur, dan memberi petunjuk kepada pimpinan setiap cabang agar Tamansiswa dapat menjunjung tinggi kekuasaan dan martabatnya agar seluruh anggota Tamansiswa tidak terpecah belah.¹³² Ki Hadjar Dewantara juga mengkritik keras pemerintah dalam negeri (Mataram) yang mendukung adanya Ordonansi Sekolah Liar dengan meningkatkan pengawasan dan menyerukan kepada seluruh cabang Tamansiswa untuk meningkatkan kewaspadaannya.

Selanjutnya Majalah Poesara kembali memuat teks utuh ordonansi sekolah swasta tahun 1923 (Lembaga Negara 1923 No.136) pada terbitan Desember 1931. Teks tersebut diberikan penjelasan namun sebab kemunculannya berhubungan dengan penyelidikan dalam *Rubrik Pertanyaan dan Djawab* yang terbit sebelumnya mengenai hak inspektur pemerintah dalam menyelidiki sekolah-sekolah bumiputera serta respon dari Tamansiswa. Pertanyaan tersebut kemudian di jawab oleh Tamansiswa yang selalu mengedepankan kewajiban Tamansiswa pada ketentuan ordonansi 1923. Selengkapny mengenai jawaban Tamansiswa diantaranya sebagai berikut:

“Kita haroes memperlakoekan (inspektur-inspektur) sebagai tamu. Kenyataannya bahwa mereka adalah tamu berarti bahwa mereka tidak berhak untuk memberikan perintah atau mengadakan peroebahan-peroebahan mengenai jadwal pelajaran atau hari-hari libur kami. Inilah perbedaan antara Tamansiswa dan sekolah-sekolah yang menerima subsidi pemerintah.”¹³³

¹³² Kenji, *op.cit*, hlm 255.

¹³³ *Majalah Poesara*, Desember 1931.

Perkembangan selanjutnya Tamansiswa tidak memberikan jawaban langsung terhadap ordonansi sekolah liar pasca terbitan berupa teks utuh tentang Ordonansi Sekolah Swasta hingga akhir September 1932. Tamansiswa hanya memperkuat dan memusatkan organisasinya serta mengembangkan kritiknya atas kebijakan dan sistem pendidikan kolonial semasa periode waktu tersebut. Periode tersebut ketika munculnya karangan-karangan Soedyo atau biasa dengan nama samara Gadjah Mada dan Ki Hadjar Dewantara, yang berisi peringatan terhadap anggota Tamansiswa untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan mereka sendiri. Selanjutnya pada terbitan Oktober 1931 menekankan pada guru guru agar tidak mengambil pekerjaan ekstra tambahan disekolah-sekolah diluar Tamansiswa, sebab hal-hal demikian dapat menunjukkan kelalaian mereka sendiri dalam menghadapi kebijakan pemerintah kolonial ordonansi sekolah liar.

Tamansiswa juga lebih memperkuat kembali persatuan seluruh anggota, dengan banyaknya karangan yang menuliskan mengenai peringatan yang harus ditaati. Karangan tersebut merupakan peringatan keras untuk seluruh anggota Tamansiswa yang melanggar prinsip-prinsip dan mengganggu persatuan Tamansiswa, dengan ancaman akan dikeluarkan dalam keanggotaan Tamansiswa.¹³⁴ Peringatan tersebut seolah menjadi isyarat bahwa Ki Hadjar Dewantara akan melakukan hak-hak diktatornya untuk anggota Tamansiswa yang melanggar peraturan, mengingat kondisi bangsa yang sedang menghadapi ordonansi sekolah liar. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tamansiswa masih kerap kali dilakukan, diantaranya masih banyak guru-guru yang

¹³⁴ *Majalah Poesara*, Oktober 1931, *loc.cit.*

meninggalkan Tamansiswa dengan kemauan sendiri dengan alasan ketidakcocokan, selanjutnya disebutkan pada terbitan Mei 1932, bahwa Suwondo Sismokusumo beserta saudaranya dari Ciamis telah mendirikan sekolah sendiri.¹³⁵ Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus Ki Hadjar Dewantara sebagai pemimpin Tamansiswa, untuk memperkuat kembali tali persatuan anggota Tamansiswa dan menentang anggota yang melanggar aturan.

Pendirian Tamansiswa mewujudkan etika dan pendirian yang keras seperti ditekankan dalam tulisan-tulisan Soedyo, yang memiliki landasan dalam *Persatuan antara Timur dan Barat*, karangan Ki Hadjar Dewantara yang diterbitkan pada tahun 1929. Ki Hadjar Dewantara juga menerbitkan karangannya mengenai *Pers dan Moral* yang diterbitkan pada Maret 1932, yang menekankan bahwa organ partai nasionalis, Suara Umum yang diterbitkan oleh Partai Bangsa Indonesia Pimpinan Soetomo memuat iklan-iklan orang Belanda yang sedang mencari wanita-wanita gundik Indonesia, ia juga sangat menolak keras berbagai surat kabar nasionalis yang memuat berbagai informasi dan foto yang tidak senonoh hanya demi uang, Poesara selalu menolak dengan tegas. Ia berpendapat bahwa yang sedang mempertahankan disiplinnya, yang harus dianggap liar bukanlah Tamansiswa, melainkan orang-orang Belanda yang berbuat semaunya sesuai kepentingan golongannya.¹³⁶

Selain mengkritik keras terhadap kebijakan pendidikan ordonansi sekolah liar Poesara juga banyak memuat gagasan-gagasan pendidikan lainnya yang dapat

¹³⁵ *Majalah Poesara*, Mei 1932.

¹³⁶ Kenji, *op.cit*, hlm 257.

menentang kebijakan pendidikan yang dijalankan. Gagasan pendidikan yang pertama diantaranya mengenai pemikiran pendidikan di Eropa yang ditulis oleh Ki Hadjar Dewantara pada Desember 1931, sementara dalam penerbitan selanjutnya seorang penulis dari golongan Tegal Alum dengan nama samara P.H.S menulis mengenai biografi-biografi empat belas ahli pendidikan Eropa yang besar.¹³⁷

Majalah Poesara selalu menuliskan gagasan-gagasan pendidikan Eropa seperti Montessori, Froebel, Tagore karena dirasa gagasan tersebut cocok dengan cita-cita Tamansiswa mengenai kebudayaan, dan secara tegas menolak terhadap sistem pendidikan umum yang ada. Gagasan pendidikan lainnya yang dinilai kritis adalah gagasan pendidikan nasional. Tujuan dengan adanya gagasan pendidikan nasional tersebut agar kaum pribumi dapat mencintai kebudayaan sendiri dan menyuarakan adanya sistem pendidikan yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan Barat.¹³⁸ Tulisan-tulisan tentang pendidikan nasional diantaranya pengajaran watak sebagai budaya nasional dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang ditunjukan agar bangsa Indonesia dapat mencintai bangsanya sendiri meskipun sudah banyak dipengaruhi oleh pendidikan bangsa Belanda.

Artikel mengenai pendidikan nasional mulai diterbitkan oleh tokoh-tokoh nasional salah satunya oleh Ki Hadjar Dewantara. Salah satu tujuan diterbitkannya artikel tersebut diharapkan dapat menghapus pendidikan yang diadakan oleh pemerintah, salah satu artikel mengenai pendidikan nasional yang terbit berjudul

¹³⁷ *Majalah Poesara*, Desember 1931, *loc.cit.*

¹³⁸ Pertiwi, *op.cit*, hlm 7-8.

Pendidikan Nasional Akan Tumbuh Di Atas Kuburan Sistem Sekolah Kolonial

Barat yang diterbitkan dalam Majalah Poesara pada Desember 1932 yang sebagian isinya berisi sebagai berikut:

“Meskipun ada ordonansi sekolah, marilah tiap roemah kita djadikan pergoeroean! Tiap orang djadilah melalui “mobilitasi cendekiawan nasional sampai ke setiap kampung pawiyatan, menggantikan sekolahan kolonial. Marilah kita kuatkan agar mampoe terwujud pendidikan nasional kita, pendidikan yang beralaskan pada budaya dan kultur bangsa Indonesia. Soenggoelah sistem kolonial mengkoeboer mimpi tjita-tjita kita tentang pendidikan nasional, sistem kolonial hanya mementingkan kepentingannya sadja, mendjauhkan kita terhadap sistem nasional, maka marilah kita rebut sistem nasional tersebut agar mendjadi bangsa jang merdeka”.¹³⁹

Seruan tersebut ditunjukan untuk seluruh kaum pribumi agar senantiasa menjaga pendidikan nasional bangsa Indonesia, meskipun terdapat penghalang dari kebijakan pemerintah, namun tidak mengurangi semangat agar tetap menyelenggarakan pendidikan.

3.2.3 Penyelesaian Ordonansi Sekolah Liar

Upaya penyelesaian yang pertama kali dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai pimpinan Tamansiswa yaitu dengan memberikan pemberitahuan sekaligus peringatan kepada pejabat-pejabat setempat. Pemberitahuan tersebut diawali dengan pertemuan antara Ki Hadjar Dewantara dan Kiewiet de Jonge yang membicarakan mengenai pelaksanaan ordonansi pada 19-21 Oktober 1932. Secara resmi pemberitahuan tersebut dikirimkan sebulan kemudian pada 24 November 1932 kepada pemerintah regional secara resmi dengan judul *Rondschrifven: Uitvoering toezicht ordonnantie particulier onderwijs* (Sirkuler: Pelaksanaan Ordonansi Pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta), yang disebut dengan

¹³⁹ *Majalah Poesara*, Desember 1932.

Circulaire (Sirkuler). Sirkuler tersebut kemudian disusul dengan instruksi dari Direktur Pendidikan dan Agama kepada inspektur-inspektur pendidikan mengenai pelaksanaan Ordonansi Sekolah Liar.

Kedua dokumen tersebut dikirimkan kepada pejabat-pejabat setempat dengan tujuan untuk memperbaiki ekses-ekses pengawasan oleh pejabat-pejabat yang melaksanakan ordonansi. Sirkuler yang dimaksud secara khusus ditunjukan pada sekolah-sekolah guru (*kweekshool*) Tamansiswa dan Muhammadiyah, yang berharap bahwa setiap lulusannya tersebut tidak dipersulit dalam perizinan mengajar. Sebuah intruksi juga menyatakan bahwa Tamansiswa dapat memberikan pendidikan menurut prinsip-prinsip dan cara-caranya sendiri dan merupakan lembaga pendidikan dengan ukurannya sendiri.¹⁴⁰ Tujuan utamanya adalah memberikan peringatan secara khusus kepada pejabat-pejabat setempat untuk mengekalkan ordonansi itu sendiri.

Sebuah usaha lainnya dilakukan oleh seorang anggota Dewan Rakyat R.A.A Wiranatakusumah yang mengirimkan surat ke pemerintah kolonial. Surat tersebut menanyakan terkait gerakan perlawanan yang menuntut pencabutan ordonansi. Pemerintah Hindia Belanda langsung memberikan respon mengenai hal tersebut dengan mengadakan sidang luar biasa dari Dewan Hindia Belanda dibawah pimpinan Gubernur Jenderal De Jonge, juga dihadiri C.W Boudenhausen, wakil ketua dewan, P.A.A Kusumo Judo, Prof. J Van Klan, W.ch. Hardeman, dan G.R Erdbrink, semuanya anggota dewan, P.G Gerke, sekretaris pertama pemerintah

¹⁴⁰ Kenji, *op.cit*, hlm 303.

pada 23 Desember 1932.¹⁴¹ Sidang tersebut membicarakan mengenai perkembangan sejak berlakunya ordonansi dan tindakan yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah dituntut untuk segera mengambil kebijakan yang akan diambil untuk menghadapi perkembangan gerakan perlawanan yang telah dilakukan oleh Tamansiswa, diantaranya melalui Telegram Dewantara, Seruan melalui Majalah Poesara, kegagalan pembicaraan antara Dewantara dengan Kiewiet de Jonge, kegagalan sirkuler untuk menyelamatkan keadaan, dan pertanyaan Wiranatakusuma.

Hasil dari sidang yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menghasilkan perbedaan pendapat antara pendapat yang bersikap keras yang menghendaki dipertahankannya status quo, dengan pendapat yang lebih fleksibel yang menginginkan penyelesaian diselesaikan menurut garis-garis yang disarankan dalam surat yang dikirimkan Wiranatakusumah. Pandangan sikap keras dipimpin oleh Boudenhausen yang juga disetujui oleh Shrieke (Direktur Pendidikan dan Agama), berbanding terbalik oleh kaum moderat termasuk Gerke dan Kusumo Judo yang juga mayoritas dalam dewan, dan perdebatan lalu bertemu dalam jawaban yang akan diberikan kepada Wiranatakusumah.

Jawaban dari pemerintah kepada Wiranatakusumah pada dasarnya menjelaskan bahwa ordonansi sudah menjadi undang-undang sehingga pemerintah tidak bisa mencabut kembali atas dasar yang disebutkan oleh Wiranatakusumah, dan perubahan ketentuan-ketentuan ordonansi telah ditolak dalam perdebatan dalam Dewan Rakyat, sehingga tidak ada tempat lagi untuk

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 305.

mempertimbangkan kembali.¹⁴² Mengingat tujuan ordonansi tersebut dimata pemerintah kolonial adalah untuk mencegah penyalahgunaan sekolah-sekolah swasta dan untuk meningkatkan mutunya, tidak sama sekali berdasarkan pertimbangan politik.

Tamansiswa kemudian mengadakan Konferensi Pemimpin-Pemimpin Tamansiswa kedua yang membahas mengenai pandangannya tentang sirkuler yang telah dibahas sebelumnya, juga konferensi mengambil tiga resolusi. Resolusi pertama menyebutkan bahwa organisasi-organisasi pendidikan lain yang menawarkan kerja sama dengan Tamansiswa dalam perjuangan melawan ordonansi akan diterima, asalkan mereka menganut tujuan-tujuan pendidikan yang suci, organisasinya baik serta bersifat nasionalis. Selanjutnya dalam Resolusi kedua menjelaskan bahwa Tamansiswa akan menerima secara aktif sukarelawan-sukarelawan untuk menjadi guru Tamansiswa serta meningkatkan kegiatan mereka dengan latihan-latihan. Sementara resolusi yang ketiga menyebutkan bahwa Tamansiswa akan berusaha menghilangkan sistem sekolah kolonial barat sebagai tahap lanjut dalam perlawanan diam-diam.¹⁴³

Ketiga resolusi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlawanan Tamansiswa ditambah dengan Tamansiswa yang akan meningkatkan kerja sama dengan partai-partai politik lain dalam menentang ordonansi tersebut. Tamansiswa juga akan memajukan sistem cantrik yang selama ini sering menjadi pertengkaran dengan pejabat-pejabat dalam menentang ordonansi, serta Tamansiswa juga akan

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Dwi Purwiko, *op.cit*, hlm 120-122.

lebih jauh mendorong sistem pendidikan berdasarkan kebudayaan nasional untuk menggantikan sistem pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah.

Penyelesaian kembali berlanjut dengan dihadapkan pada konflik yang terjadi dalam pemerintah antara yang bersikap keras dan yang moderat terus bersitegang. Menurut pandangan Tamansiswa konflik antara Schrieke dan Boudenhuisen di satu pihak dan Kiewiet de Jonge dan Gerke di lain pihak, gubernur jenderal, disebabkan karena kedekatannya dengan Sekretaris Pertama Gerke, yang cenderung berpihak kepada yang moderat.¹⁴⁴ Perbedaan pandangan yang terjadi di pemerintah Hindia Belanda dinilai dapat menguntungkan Tamansiswa, karena ada pemerintah yang moderat dalam menyelesaikan masalah.

Pandangan yang bersikap keras seperti Schrieke yang mengenal baik masyarakat dan pemerintah kolonial kebudayaan Jawa, *orde en rust* hanya bisa melakukan dengan tindakan yang keras. Sementara bagi orang Belanda yang bermaksud baik seperti Kiewiet de Jonge, yang mampu menunjukkan sikap dan pengertian yang baik dengan menyelesaikan masalah dengan cara tertib dan damai sesuai dengan moto yang digagas oleh Tamansiswa. Kondisi dengan adanya perbedaan sikap antara golongan yang keras dan moderat memperlihatkan bahwa adanya ketidaktegasan di antara anggota-anggota Dewan Hindia (Gubernur Jenderal Idenburg dan pejabat-pejabat tinggi kolonial).¹⁴⁵ Perlawanan Tamansiswa terhadap Ordonansi Sekolah Liar yang telah mengumpulkan seluruh gerakan

¹⁴⁴ Kenji, *Op.cit*, hlm 307

¹⁴⁵ Ibid, hlm 307-308

nasionalisnya dirasa mampu menunjukan keberhasilan yang menyebabkan munculnya orang-orang moderator seperti Kiewet de Jonge di orang Belanda.

Perbedaan pandangan pemerintah antara yang bersikap keras dan moderat kemudian dimanfaatkan oleh Wiranatakusumah dengan mengajukan usul inisiatif pada 11 Januari. Tujuannya agar Dewan Rakyat dapat memprakarsai pembuatan undang-undang mengenai tiga butir ordonansi. Isi dari tiga butir undang-undang tersebut yaitu Ordonansi akan ditarik kembali setelah satu tahun, ordonansi lama akan dihidupkan kembali, dan satu komite dibentuk untuk menguji ordonansi itu selama satu tahun.¹⁴⁶ Sementara kondisi masyarakat saat itu banyak yang depresi karena maraknya pengangguran, salah satu dampak dari ordonansi tersebut. Kemudian menteri jajahan Belanda, De Graaff, mengirimkan nota kepada Gubernur Jenderal yang berisi mengenai tindakan yang harus dilakukan dengan banyaknya orang yang depresi tersebut. Kondisi tersebut dirasa sangat tidak baik bagi pemerintah jika gerakan perlawanan tersebut terus tumbuh, bahwa tujuan untuk mengawasi sekolah-sekolah liar bisa dilakukan dengan ordonansi yang lama, serta usul Wiranatakusuma bisa disetujui.

Dengan banyaknya dorongan dari pemerintah Belanda yang moderat yang mengingatkan permasalahan dapat diselesaikan secara tertib dan damai akhirnya dapat diwujudkan. Salah satunya mengenai usulan Wiranatakusuma di perdebatkan dalam rapat seksi Dewan Rakyat pada 23 Januari. Sekretaris pertama pemerintah memberikan jawabannya berupa catatan yang menjelaskan bahwa pemerintah bertambah yakin bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan keadaan tersebut

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 308.

adalah memperbaiki ordonansi dengan keputusan yang diambil dalam Dewan Rakyat. Ia juga mengatakan bahwa Gubernur Jenderal telah menerima kabar bahwa menteri jajahan telah mengirimkan nota, tapi nota tersebut belum tiba.¹⁴⁷ Pernyataan tersebut mampu memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial telah mulai bergerak ke arah yang ditunjukkan menteri.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Ordonansi 1933 No. 66 pada tanggal 20 Februari yang menandakan bahwa secara resmi pelaksanaan ordonansi 1932 akan ditunda selama satu tahun dan ordonansi baru akan dipertimbangkan kembali oleh pemerintah dan Dewan Rakyat.¹⁴⁸ Setelah diresmikannya Undang-undang tersebut Ordonansi Sekolah Liar ditunda selama satu tahun dan ordonansi baru yang sebelumnya sempat ditetapkan akan dipertimbangkan kembali karena menuai berbagai pro dan kontra bagi seluruh masyarakat. Sejarah pergerakan nasionalis Indonesia telah memperlihatkan bahwa Tamansiswa mampu menunjukkan ketahanan dalam perlawanan dan kekuatan untuk mempertahankan, yang dalam perlawanannya sangat mempengaruhi gerakan rakyat pribumi.¹⁴⁹ Perjuangan Tamansiswa dalam menghadapi sistem pendidikan kolonial yang mendirikan Ordonansi Sekolah Liar memperlihatkan bahwa Tamansiswa dapat beradaptasi dibawah keadaan-keadaan tertentu, dan mampu memperlihatkan sepenuhnya sebagai lembaga yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Dwi Purwoko, *op.cit*, hlm 131-32.